



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 124 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN  
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 124 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 124 TAHUN  
2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2022

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1. penyusunan kebutuhan; dan 2. pengusulan kebutuhan.													Tindak lanjut Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
2.	Peraturan Menteri	Basis Data Penyusunan Rencana	1. Spesifikasi data peta;													Tindak lanjut Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Zonasi/Materi Teknis Ruang Laut.	2. Penentuan sistem penyimpanan kelas fitur; 3. Penentuan struktur data untuk kelas fitur; 4. Penyimpanan file peta; dan 5. Interoperabilitas data.													Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.	Peraturan Menteri	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di Bawah 100 km <sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi)	1. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya; 2. Tata Cara Penerbitan Izin dan Rekomendasi; 3. Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin dan Rekomendasi; 4. Pengawasan; dan 5. Sanksi Administratif.													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	1. Penetapan kategori kawasan; 2. Penetapan zona; 3. Batas koordinat; dan 4. Peta.													<p>Tindak lanjut</p> <p>1. Pasal 7 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan</p> <p>2. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
5.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	Penetapan Jenis Ikan yang Terancam Punah													<p>Kumulatif terbuka</p> <p>Tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf u Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004</p>

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Pelestarian	1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan; 2. Isu dan permasalahan: a. penurunan populasi karena penangkapan berlebihan, tangkapan sampingan, spesies invasive, perdagangan ilegal; b. kerusakan ekosistem karena alat tangkap yang merusak, dampak pembangunan, pencemaran perairan, perubahan iklim.													Kumulatif terbuka

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3. Tantangan: a. Tumpang tindih dalam melakukan upaya pengelolaan; b. Dorongan ekonomi; c. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum d. Penguatan data dan informasi'; e. Rendahnya kesadaran masyarakat. 4. Kedudukan rencana aksi pelestarian; 5. Tahapan pengelolaan jenis ikan terancam punah; 6. Tahap pelaksanaan; 7. Tahap evaluasi; 8. Visi, misi, sasaran, dan program; dan 9. Sasaran pengelolaan tiap tahun.													
7.	Keputusan Menteri	Pencatatan, Pengadministrasian, dan Pemutakhiran data Kesesuaian Kegiatan	Tata cara terkait pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data Kesesuaian Kegiatan													Tindak lanjut Pasal 149 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)													Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
8.	Keputusan Menteri	Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan dalam Appendiks II <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i>	Menetapkan kuota pengambilan yang memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan jenis ikan dalam Appendiks II <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>													Tindak lanjut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Diindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i> , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019.
9.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya	Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas													Tindak lanjut Pasal 10 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian



NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap beberapa jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya yang belum ditetapkan harga patokannya													Kelautan dan Perikanan
10.	Keputusan Menteri	Bulan Cinta Laut	1. penetapan rencana aksi penanganan sampah laut 2. pembentukan kelompok kerja penanganan sampah laut													Tindak lanjut Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

## 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan													Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
2.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	1. Pendahuluan; 2. Status perikanan terkini; dan 3. Rencana strategis pengelolaan perikanan.													Tindak lanjut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3.	Keputusan Menteri	Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia													Tindak lanjut Pasal 18 ayat (1) Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan API dan ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
4.	Keputusan Menteri	Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	Batas Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan dan Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.													Tindak lanjut Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
5.	Keputusan Menteri	Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan	Menetapkan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat													Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pascaproduksi Atas Jenis PNBPN yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan	Penarikan Pascaproduksi													atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya	Pengaturan mengenai Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya													Tindak lanjut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan	Pengaturan kembali mengenai Uji Proksimat													Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih	Mekanisme penerbitan rekomendasi oleh BKPM dan penegasan bahwa rekomendasi ini sifatnya transaksional													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Ikan, dan/atau Inti Mutiara														

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan	Neraca Komoditas Perikanan mengatur penyesuaian komponen data neraca komoditas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dengan beberapa perubahan seperti perubahan judul, pengajuan rencana usaha, verifikasi rencana kebutuhan dan perubahan neraca komoditas perikanan													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman	Fasilitasi Penanaman Modal mengatur Bidang usaha, cakupan daerah yang diberikan fasilitas serta kriteria pelaku usaha yang mendapat fasilitas													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan														
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib	Lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi dengan ruang lingkup SNI Tuna dalam kemasan kaleng dan SNI Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng													
4.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jenis Hasil Perikanan yang dibatasi Pemasukan ke Dalam Wilayah Negara Republik	Penyesuaian Kode HS dengan <i>Harmonized Commodity Description and Coding System/ Harmonized System (HS) 2022</i> dan <i>ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022</i> yang terdiri:													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Indonesia dan Tempat Pemasukan Komoditas Perikanan dan Tempat Pemasukan Komoditas Pergaraman	a. 319 (tiga ratus sembilan belas) HS Code tidak mengalami perubahan/tetap; dan b. 39 (tiga puluh sembilan) HS Code mengalami penyesuaian (hilang atau split/terbagi menjadi beberapa HS Code).													

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	Revisi Pasal 49 ayat (5) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memutuskan banding administratif													

6. Inspektorat Jenderal

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pemantauan Kegiatan prioritas yaitu Kegiatan Fisik dan Keuangan; dan 2. Penyesuaian Mekanisme Pengendalian Pengawasan di KKP secara elektronik.													

7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Mengatur terkait dengan penjenjangan kualifikasi kompetensi													
2.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	1. Ketentuan Umum; 2. Identitas; 3. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;													
3.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	4. Sistem pengelolaan; 5. Pengangkatan dan Pemberhentian; 6. Sistem Pengendalian													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	dan Pengawasan Internal; 7. Dosen dan Tenaga Pendidikan; 8. Peserta Didik dan Alumni;													
5.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	9. Kerja Sama; 10. Sarana dan Prasarana;													
6.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	11. Pendanaan; 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal; 13. Akreditasi;													
7.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	14. Tanda bukti kelulusan; 15. Ketentuan peralihan; dan 16. Ketentuan penutup.													
8.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai														
9.	Keputusan Menteri	Pelepasan Jenis Ikan Baru	Menetapkan Jenis Ikan Baru untuk dibudidayakan													

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional	1. Ketentuan Umum; 2. Pangkat, Golongan Ruang, dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;													



NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Inspektur Mutu Hasil Perikanan	3. Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal; 4. Pengusulan, Penilaian, Penetapan Angka Kredit; 5. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; 6. Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan kembali; dan 7. Ketentuan penutup.													
2.	Peraturan Menteri	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1. Ketentuan Umum; 2. Pangkat, Golongan Ruang, dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; 3. Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal; 4. Pengusulan, Penilaian, Penetapan Angka Kredit; 5. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; 6. Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan kembali; dan 7. Ketentuan penutup.													
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Penghitungan	1. Ketentuan umum;													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan	2. Penyusunan kebutuhan; 3. Perhitungan kebutuhan; 4. Pengusulan kebutuhan; 5. Ketentuan penutup; dan 6. Lampiran perhitungan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan													
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1. Ketentuan umum; 2. Penyusunan kebutuhan; 3. Perhitungan kebutuhan; 4. Pengusulan kebutuhan; 5. Ketentuan penutup; dan 6. Lampiran perhitungan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan													
5.	Peraturan Menteri	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa	Penetapan Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan														
6.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster ( <i>Panulirus</i> spp.), Kepiting ( <i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan ( <i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia	1. penyesuaian tugas riset dengan adanya perubahan kelembagaan badan riset; 2. pembudidayaan benih bening lobster ( <i>puerulus</i> ) dapat dilakukan di luar wilayah provinsi lokasi penangkapan benih bening lobster ( <i>puerulus</i> ); dan 3. segmentasi usaha pembudidayaan lobster ( <i>Panulirus</i> spp.).													
7.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2020 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina	Penetapan Bandar Udara/Pelabuhan/Pos Lintas Batas/Kantor Pos sebagai Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina													

9. Biro Perencanaan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan	<div>1. Dasar Pelimpahan Urusan;</div> <div>2. Karakteristik urusan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan;</div> <div>3. Nama program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka Dekonsentrasi;</div> <div>4. Nama program dan kegiatan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan;</div> <div>5. Penetapan pejabat pengelola anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;</div> <div>6. Persyaratan pejabat pengelola anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;</div> <div>7. Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, termasuk mekanisme laporan Dekonsentrasi</div>													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			dan Tugas Pembantuan; dan 8. Pembinaan dan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Prosedur kerja sama antara KKP dan Kementerian/Lembaga, Pemda, dan NGO; dan 2. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi.													
3.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja) Tahun 2023	1. arah kebijakan, sasaran strategi, program (sasaran program, indikator sasaran program, output program, dan indikator output program), dan kegiatan (sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan), serta terkait dukungan terhadap prioritas nasional, major project, kegiatan tematik, dan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023; 2. matriks Renja KKP Tahun 2023; dan 3. rincian komponen kegiatan utama dan dukungan pada terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023.													
4.	Keputusan Menteri	Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	Menetapkan indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022													

10. Biro Keuangan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kementerian Kelautan dan Perikanan														
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan; 2. Jenis, jumlah, dan standar kendaraan; 3. Rencana kebutuhan kendaraan; 4. Tata tertib penggunaan kendaraan; dan 5. Monitoring dan evaluasi.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Sistem Akuntansi Instansi Kementerian; 2. Kelembagaan; 3. Sistem Akuntansi Keuangan Kementerian; 4. SIMAK-BMN; 5. Mekanisme; 6. Pembinaan; 7. Pengawasan; dan 8. Pelaporan.													Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

11. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>Perubahan organisasi dilakukan sebagai respons/tindak lanjut atas beberapa isu strategis, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; dan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya.</li> </ol>													



NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
2.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemetaan Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 2. Susunan Organisasi; 3. Kelompok Jabatan Fungsional; 4. Tata Kerja; 5. Eselonisasi; dan 6. Lokasi.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Penambahan 1 (satu) divisi dalam struktur organisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan													Menyesuaikan hasil pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB dengan menambah satu divisi.
4.	Peraturan Menteri	Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pakaian kerja dan atribut; 2. Pengawasan dan pembinaan; dan 3. Pengadaan.													
5.	Peraturan Menteri	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kelembagaan Manajemen Talenta; 2. Infrastruktur Manajemen Talenta; dan 3. Penyelenggaraan Manajemen Talenta.													Tindak lanjut Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Instansi.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
6.	Peraturan Menteri	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan; 2. Tugas Penanggung Jawab Pelaksana PPKSDMA; 3. Pelaksanaan Pengebagan Kompetensi; 4. Periode Pelaksanaan PPKSDMA; 5. Desian Diklat PPKSDMA; 6. Evaluasi Pengembangan Kompetensi; dan 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi.													
7.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pemotongan tunjangan kinerja terkait hasil penilaian kinerja Jabatan Fungsional; 2. Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 3. Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan 4. Penyesuaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.													
8.	Keputusan Menteri	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	Penjabaran rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.													
9.	Keputusan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Identitas Jabatan; 2. Kompetensi Jabatan; dan 3. Persyaratan Jabatan.													Tindak lanjut Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
10.	Keputusan Menteri	Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian	Menetapkan nama layanan publik dan produk layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kelautan dan Perikanan														
11.	Keputusan Menteri	Kamus Kompetensi Teknis	1. Daftar Jenis Kompetensi Teknis; 2. Definisi Kompetensi Teknis; 3. Deskripsi Kompetensi Teknis; dan 4. Indikator Perilaku untuk Setiap Level Kompetensi Teknis.													

## 12. Biro Hukum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyempurnakan bantuan hukum untuk kasus pidana													Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2.	Keputusan Menteri	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di	Menetapkan program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	dan Perikanan Tahun 2023													

13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. sasaran dan kegiatan kehumasan; 2. strategi komunikasi; 3. tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit kehumasan; 4. forum komunikasi kehumasan; 5. kode etik dan etika profesi kehumasan; dan 6. pembinaan, monitoring, dan evaluasi kehumasan.													
2.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Portal Konten Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Konten Portal Web dan Situs Web; 2. Pengelolaan Portal Web; 3. Pengelolaan konten Portal Web; dan 4. Pemantauan dan evaluasi.													

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Perubahan logo; dan 2. Penambahan materi tata naskah elektronik.													Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya.


15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	1. Perubahan istilah pelaku utama; 2. Penambahan profesi pelaku utama pendukung; 3. Kuesioner pendataan Kusuka dan pengumpulan data produksi kelautan dan perikanan; 4. Perubahan logo; dan 5. Pencetakan kartu Kusuka.													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
Egon Martiana